

LIBERALISME, MULTIKUTURALISME DAN TOLERANSI

Oleh

Yoseph Andreas Gual

Makalah ini adalah upaya untuk menyajikan pemikiran tentang liberalism, multikulturalisme dan toleransi. Ketiga konsep ini tumbuh, berkembang dan menjadi bagian dari identitas masyarakat demokrasi. Dalam dunia demokrasi liberalism menjadi hal dasar di mana kebebasan diberikan kepada individu untuk mengekspresikan pendapat dan dirinya dengan membatasi intervensi negara atau lembaga. Penghayatan akan liberalisme menghadirkan tubuhnya berbagai macam identitas sosial dari individu-individu yang ada yang menjadi warna khas dari masyarakat demokratis. Berkembangnya beragam pemikiran dan praktik pemikiran sosial merupakan ungkapan nyata dari multikulturalisme. Masyarakat yang multicultural memiliki syarat mutlak untuk tetap bertumbuh yakni toleransi akan semua perbedaan. Toleransi ini memuat masyarakat demokratis bertumbuh dan menjadi pilihan terbaik dari cara hidup dan berpolitik masyarakat dunia hingga kini.

A. Liberalisme

Liberalisme merupakan filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di depan hukum (Nando, 2020). Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Bagi liberalisme tujuan negara sebagai asosiasi individu-individu yang independen adalah memfasilitasi proyek “kebahagiaan” anggota masyarakat karena itu negara tidak boleh memaksa proyeknya sendiri (Minogue, 2008). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa individu yang mendahului masyarakat atau negara oleh karena itu, semua bentuk pemahaman politik harus menghormati hal mendasar ini dengan memberikan perasaan nyaman dan aman kepada individu untuk secara bebas mengejar tujuan pribadinya (Roland, 2000). Pandangan ini melihat bahwa dalam masyarakat plural tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa, karena itu hukum yang dibuat oleh negara haruslah menjamin keadilan semua individu dalam meraih tujuan hidupnya.

Liberalisme berasumsi bahwa manusia sejak lahir memiliki hak-hak alamiah (bebas berkumpul, pendapat, ekspresi diri) sehingga siapapun tidak berhak menghalanginya (Suyudi, 2003). Masyarakat dan pemerintah wajib menjaga kebebasan individu. Selain hak alamiah ini, manusia sejak awal sudah dianugerahi akal budi yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan memahami serta mengatur lingkungannya secara baik dan adil. Karena semua manusia mendapatkan akal budi yang sama maka semua orang sederajat dan tidak boleh ada yang menindas satu dengan yang lain. Satu-satunya batasan atas kebebasan manusia terhadap kebebasan orang lain yakni moral yang tidak tertulis di mana seseorang tidak boleh menjalankan kebebasannya dengan melanggar kebebasan orang lain.

Pandangan dasar terhadap manusia semacam ini berpengaruh pada cara pandang kaum liberal kepada hidup bersama atau masyarakat. Menurut kaum liberal, masyarakat ada karena individu mau melepaskan sebagian kebebasannya kepada hidup bersama karena itu tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai kesejahteraan individu. Masyarakat hanya menjadi wadah bagi kemajuan kepentingan anggotanya dengan menciptakan keamanan dan perlindungan yang baik. Cara pandang terhadap hidup bersama semacam ini pada akhirnya mempengaruhi cara pandang kaum liberal terhadap institusi negara. Kaum liberal menganggap negara sebagai alat untuk memajukan dan memaksimalkan terwujudnya kepentingan anggota masyarakat. Sebab sebelum negara ada manusia dengan akal budinya telah ada dalam keadaan sederajat sehingga tugas negara adalah menjaga kebebasan individu. Negara yang paling baik adalah negara yang paling sedikit mengatur warga negara dan jika negara tidak mampu mewujudkan hal tersebut oknum pemerintahan sebaiknya melepaskan jabatannya.

Kaum libertarian melihat hakekat kebenaran dan pengetahuan sebagai sesuatu yang dianugerahkan Tuhan melalui akal budi. Dasar kekuatan manusia terletak pada pemanfaatan akal budi guna mencari pengetahuan. Karena itu, kebenaran bagi kaum liberal berasal dari pikiran manusia yakni pengetahuan yang digali dari potensi akal budinya dan bukan dari kekuasaan. Karena semua orang memiliki akal budi maka individu tidak perlu diarahkan untuk menerima sebuah kebenaran tertentu. Kebenaran akan ditemukan manakala orang mau berdebat secara terbuka atau mau bermusyawarah dengan individu yang lain.

Dengan mencermati postulat dasar liberalisme tentang manusia, masyarakat, negara, pengetahuan dan kebenaran maka ada beberapa prinsip mendasar dari aliran filsafat liberalisme ini (Butler, 2019):

1. Praduga atas kebebasan

Kaum liberal mendukung kebebasan individual yang juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi namun memiliki dasar yang berbeda tentang mengapa kebebasan tersebut penting dijunjung tinggi. *Kaum liberal klasik* melihat kebebasan baik untuk kebebasan itu sendiri karena secara psikologis seseorang yang sehat pasti akan memilih kebebasan bukan keterikatan. *Kaum pembela hak alamiah* melihat kebebasan sebagai pemberian Tuhan atau alam karena itu tidak boleh direnggut. Ada yang berpendapat bahwa kebebasan merupakan kontrak sosial dalam upaya menghindari konflik dan kekacauan. Ada yang lihat kebebasan sebagai syarat untuk kemajuan. Dan bagi kaum humanis melihat bahwa kebebasan adalah bagian penting dari eksistensi kemanusiaan seseorang, jika kebebasan direnggut maka manusia menjadi budak dari orang lain.

2. Keutamaan individu

Kaum liberal lebih mementingkan kepentingan individu ketimbang kepentingan kolektif jika tidak ada alasan yang sangat mendasar. Mereka berargumen masyarakat tidak memiliki pemikiran sendiri hanya individu yang berpikir, menilai, memilih dan mengendalikan keadaan. Bila individu tidak sependapat dengan individu yang lain, bukan berarti mewakili kepentingan kelompok melainkan kepentingan individu yang berkonflik. Berdasarkan pengalaman, ketika kebebasan individu dilepaskan sepenuhnya kepada kelompok, kelompok dapat memanfaatkan hak itu untuk menindas individu. Misalnya kekejaman Hitler, Pol Pot dan lainnya. Karena masyarakat sangat kompleks maka tidak ada otoritas yang lebih tahu dari individu akan apa yang dibutuhkan oleh individu itu sendiri.

3. Peminimalisasian pemaksaan

Kaum liberal ingin hidup bersama secara damai oleh karena itu mereka berupaya untuk meminimalisir pemaksaan dan ancaman. Untuk itu mereka memberikan hak penggunaan kekerasan kepada pemerintah dan otoritas kehakiman untuk menjaga kebebasan namun ketika otoritas ingin menggunakan kekuasaan dan kekerasan, mereka wajib mengemukakan alasan pembenaran yang jelas mengapa pengekangan dan kekerasan itu layak ditempuh.

4. Toleransi

Kaum liberal melihat toleransi dan saling menghormati sebagai landasan untuk terciptanya kerja sama yang damai dan terciptanya masyarakat yang saling menguntungkan dan berfungsi dengan baik. Perbedaan antara manusia adalah fakta dalam kehidupan sosial, dan

akan selalu seperti itu. Liberalisme tidak percaya bahwa perbedaan tersebut bisa dihilangkan dan sangat skeptis dengan usaha para utopis yang mencoba untuk melakukannya. Oleh karena itu, toleransi akan selalu menjadi bagian penting dalam fungsi kehidupan sosial.

5. Pemerintah perwakilan dan terbatas

Kaum liberal percaya bahwa demokrasi perwakilan (representatif) dan konstitusional adalah cara terbaik yang pernah ditemukan untuk menjaga agar para anggota legislator bisa akuntabel pada rakyatnya. Pemilihan umum bukan hanya sekedar tentang memilih pemimpin yang baik, tetapi menyingkirkan yang buruk. Dengan pemilih yang lebih siaga dan lebih mendapat informasi (berpengetahuan), maka para legislator bisa bekerja dengan baik. Walau demikian, demokrasi memiliki batasannya; dia bisa saja menjadi cara yang baik dalam membuat keputusan, tetapi hanya sedikit keputusan; biasanya lebih baik jika kita membiarkan individu membuat keputusan mereka sendiri.

6. Supremasi hukum

Prinsip mengekang kekuasaan dan menciptakan keamanan bagi publik adalah supremasi hukum (kekuasaan hukum). Ini adalah ide bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum yang diketahui luas, bukannya oleh keputusan sepihak dari pejabat pemerintah. Hukum sama untuk semua warga negara dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Untuk menjaga supremasi hukum dibutuhkan sistem peradilan yang independen dan tidak bisa dikendalikan oleh individu atau kelompok atau pemerintah. Diperlukan prinsip yudisial mendasar seperti *habeas corpus*, pengadilan oleh juri dan proses hukum untuk mencegah mereka yang berkuasa untuk menggunakan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Kekuasaan (supremasi) hukum memiliki akibat membahagiakan lainnya - dia membuat hidup lebih bisa diprediksi, karena hukum memungkinkan masyarakat untuk mengantisipasi bagaimana orang-orang (termasuk para pejabat) akan dan tidak akan berbuat. Dengan kemampuan prediksi, individu dapat membuat rencana jangka panjang tanpa perlu takut rencana ini akan dihancurkan oleh pihak lain.

7. Keteraturan spontan

Kaum liberal tidak percaya bahwa masyarakat yang kompleks membutuhkan pemerintahan yang besar dan berkuasa untuk menjalankannya. Bagi mereka, keteraturan sosial bukan berasal dari rancangan pemerintah melainkan tindakan spontan manusia. Bahasa, adat istiadat, budaya, pasar dan jasa bukanlah hasil rancangan pemerintah melainkan merupakan tindakan manusia secara spontan.

8. Kepemilikan, perdagangan dan pasar

Kaum liberal percaya bahwa kesejahteraan/kekayaan tidaklah diciptakan oleh pemerintah, tetapi oleh kerjasama antara berbagai individu dalam keteraturan spontan mekanisme pasar. Kesejahteraan tercipta lewat individu merdeka yang menemukan, menciptakan, menabung, berinvestasi dan, tentu saja mempertukarkan barang dan jasa secara sukarela, untuk keuntungan bersama. Hal ini merupakan keteraturan spontan dari ekonomi pasar bebas.

9. Masyarakat Sipil

Manusia tidak sekedar individu yang terlepas dari orang lain karena itu berserikat dan berkumpul untuk menyediakan kebutuhan individu adalah cara terbaik ketimbang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan ini, individu akan mengorganisikan diri sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Inilah yang menjadi dasar masyarakat sipil. Dalam lembaga-lembaga bentukan warga negara inilah kaum liberal berinteraksi dan saling terhubung dengan yang lain untuk membangun saling pengertian dan menyediakan kebutuhan bersama dan membangun.

10. Nilai manusia yang sama

Kaum liberal percaya bahwa nilai kemanusiaan yang sama menjadi dasar keuntungan hidup bersama. Mereka yakin bahwa prinsip dasar kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi dalam hukum. Hal ini menjadi dasar bagi keteraturan spontan sosial yang baik yang didasarkan pada rasa saling menghormati, toleransi, non-agresi, kerja sama dan pertukaran sukarela antara orang-orang yang bebas. Kaum liberal tahu bahwa masyarakat yang baik tidak bisa hanya bersandar hanya pada kebaikan manusia. Tetapi bersandar pada kerja sama damai antara berbagai individu yang saling berbeda dan mementingkan diri. Karena itu, kelompok ini setuju dengan kebebasan dan persamaan di depan hukum, dengan sistem peradilan yang kuat dan bisa dipercaya yang mencegah adanya tebang pilih dalam implementasi hukum.

Dalam perkembangannya liberalisme mendapatkan beberapa kritikan tajam dari para ahli sosial (Minogue, 2008):

- a) Liberalisme sering mengaburkan realitas sosial dan politik. Manusia merupakan makhluk individual sekaligus sosial. Pemikiran liberal cenderung menekankan sisi individu seseorang sehingga manusia dipandang cenderung berkonflik dengan sesamanya atau malah sering disebut borjuis. Kritik ini disanggah dengan mengatakan aspek kreativitas individu menjadi penting dan dengan kreativitas manusia bisa berkumpul dan memecahkan masalah bersama.
- b) Karena individualis maka liberalism cenderung dilihat sebagai jantung keserahan dunia dan egoism. Namun kritik ini mudah dipatahkan sebab berdasarkan data kaum liberalislah yang paling sering memberi bantuan.
- c) Liberalisme menyamaratakan tingkat rasional setiap orang padahal sebenarnya tidak sama.
- d) Memberi kesempatan yang sama kepada semua orang kedengarannya bagus namun dalam realitas sosial tanpa intervensi dari pemerintah yang lemah/kurang akan selalu di bawah ditekan oleh mereka yang memiliki uang dan pengaruh dan kuasa.
- e) Penekanan pada kebebasan pada akhirnya akan merusak ikatan yang menyatukan dan menjaga tatanan sosial.
- f) Netralitas negara merupakan sebuah ilusi karena negara pasti akan melakukan intervensi kepada kehidupan bersama.

B. Multikulturalisme

Sejak awal munculnya, multikulturalisme dianggap sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutual dari satu etnik kepada etnik lain – dengan memberikan keleluasaan agar etnik lain dapat mengekspresikan budaya etniknya dan ekspresi budaya etnik itu merupakan salah satu kontribusi bagi pengembangan budaya suatu bangsa (Liliweri, 2018). Dengan definisi ini dapat dikatakan bahwa multikulturalisme dapat dilihat dari perspektif sosiologis dan perspektif politik. Dari perspektif sosiologi, multikulturalisme merupakan suatu fakta sosial atau kondisi multikultural. Sementara dari perspektif politik, multikulturalisme merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan keberagaman budaya etnik dalam masyarakat.

Multikulturalisme merupakan cara pandang terhadap entitas budaya dan pendukungnya yang beragam. Cara pandang ini menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap

keanekaragaman kebudayaan beserta pendukungnya sehingga dapat menjalankan fungsi hidup bersama dengan sebuah sistem yang harmonis (Arif, 2021). Dengan demikian dalam masyarakat multikultural, setiap kebudayaan mendapatkan penghargaan sekaligus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kondisi sosia-kultural yang harmonis.

Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan di mana fungsinya merupakan pedoman kehidupan manusia sehingga konsep multikulturalisme tidak sama dengan konsep keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Penekanan multikulturalisme terletak pada kesederajatan aneka ragam kebudayaan lengkap dengan berbagai suku bangsa pendukungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Parekh memetakan masyarakat multikulturalisme dalam lima kategori yang jelas. *Pertama*, isolasionis yang mengacu pada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal antara satu dengan yang lainnya. *Kedua*, akomodatif yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, kritis atau interaktif yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultural kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan yakni masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan komit terhadap budaya tertentu sebaliknya bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Suharno, 2021).

Multikulturalisme menekankan pada keragaman sosial yang setara di mana terjadi hubungan timbal balik dalam masyarakat. Hubungan resiprokal ini merupakan hal yang substansial. Syarat agar hubungan kesalingan ini berjalan harmonis dibutuhkan tiga syarat mendasar yang menjadi kompetensi normatif yakni kompetensi kebudayaan, kompetensi kemasyarakatan dan kompetensi kepribadian (Arif, 2021). Kompetensi kebudayaan merupakan kumpulan pengetahuan yang memungkinkan bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan komunikatif dapat membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsensus

bersama. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan yang sah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat multikultural yang memungkinkan bagi siapapun untuk terlibat dalam tindakan komunikatif sehingga membentuk solidaritas yang harmonis. Sedangkan kompetensi keberibadian merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat berpikir, berbicara dan bertindak sehubungan dengan partisipasinya dalam hubungan timbal balik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

Dari ketiga kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang dalam masyarakat multikultural ini maka dapat dikatakan bahwa multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan atau isu-isu sektarian yang dapat mengancam keharmonisan hidup bersama.

Multikulturalisme lahir dari perubahan sosial dan realitas kehidupan manusia sendiri yang disambut dengan berbagai kebijakan negara. Namun demikian ada tiga faktor pendorong utama hingga multikulturalisme dapat diterima dan diserap oleh hampir semua negara yakni perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi (Tilaar, 2005). (a) Dalam sejarah kehidupan manusia, ada sebuah masa di mana hak kemanusiaan seseorang atau sekelompok orang ditindas oleh rezim penjajah, otoritarianisme dan pemerintah kerajaan absolut. Namun setelah perang dunia kedua, PBB mencetuskan kesepakatan bersama antarbangsa pada tahun 1948 yakni *Universal Declaration of Human Right*. Deklarasi ini merupakan permulaan dari gerakan lama dan panjang dalam menegakan hakikat hidup manusia yang sama dan setara tanpa membedakan warna kulit, agama, kepercayaan dan asal-usul. (b) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan dunia seperti sebuah desa global (*global village*). Ruang dan waktu semakin dipersingkat malah saat ini seperti sudah tidak menjadi sebuah masalah bagi manusia untuk saling berhubungan. Situasi ini membuat hubungan antarmanusia yang beragam dapat terjadi dengan mudah, murah dan cepat. Inilah globalisasi di mana budaya baru datang begitu cepat ke suatu tempat dan budaya setempat tidak bisa menolak budaya baru tersebut. Sebaliknya, budaya setempat dapat memperkenalkan diri kepada orang dari budaya lain di tempat asalnya atau ke tempat lain. Dalam situasi semacam ini, kemungkinan benturan antarbudaya sangat memungkinkan. (c) Demokratisasi menjamin semua warga negara memberikan pendapat dan suaranya tanpa perlu khawatir. Hal ini menjadi

faktor lain yang mendorong perkembangan multikulturalisme. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang beragam dan dengan pengakuan terhadap keberagaman budaya berarti mengakui juga hak asasi manusia. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Karenanya, dapat dikatakan bahwa multikulturalisme sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demorasasi yang menjadi ciri utama dari kehidupan sosial abad 21.

Menurut Berghe (PGSD/MI, 2020) masyarakat multikulturalis memiliki beberapa sifat (1) terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok sub kebudayaan berbeda satu sama lain; (2) memiliki tatanan sosial yang terbagi dalam lembaga; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara anggota; (4) terdapat integrasi sosial yang tumbuh berdasarkan paksaan dan saling membutuhkan dalam ekonomi dan (5) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Selain itu, terdapat tiga masalah pokok yang berkaitan dengan pemikiran multikulturalisme yakni identitas kelompok, globalisme dan nasionalisme dalam kemas negara bangsa (Tilaar, 2005). Masalah identitas kelompok muncul manakala globalisasi menyebar ke semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai etnis dan kelompok merasa khawatir identitas kelompoknya akan menghilang karena maraknya budaya massa. Kekhawatiran ini mendorong kelompok melakukan resistensi dan penguatan identitas kelompok. Efek lanjutnya adalah makin menguatnya polarisasi antara kekuatan kelompok dalam negara bangsa. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan negara bangsa yang kembali tersekat-sekat. Globalisasi juga pada akhirnya meninggalkan masalah baru bagi budaya nasional dan budaya lokal/kelompok.

Dalam situasi semacam ini dibutuhkan sikap kritis yang relevan dikembangkan dalam masyarakat multikulturalis yakni: (a) mengembangkan sikap toleransi dalam menghadapi segala perbedaan budaya, ras, suku, agama agar tercipta integrasi dalam masyarakat. (b) meninggalkan sikap prasangka buruk atas suku, bangsa, ras, agama yang berbeda yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. (c) Mengembangkan sikap cinta tanah air dengan tulus akan membawa negara pada kesatuan dan persatuan serta mengesampingkan segenap perbedaan dan (d) mengembangkan kesadaran

setiap individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki peranan masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya (PGSD/MI, 2020).

C. Toleransi

Dalam masyarakat majemuk dibutuhkan sikap menghormati satu sama lain agar kehidupan bersama tetap aman dan terjaga. Sikap menghormati tersebut dikenal dengan toleransi. Toleransi berarti membiarkan keberadaan seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu yang berbeda atau kurang disukai dengan kesabaran sehingga hal tersebut dapat bertahan. Karena itu, toleransi tidak cukup diidentifikasi sebagai sebuah sikap melainkan juga sebuah kesadaran, suatu cara berpikir yang kekhasannya terletak pada kemauan untuk saling menerima dan menghormati perbedaan (Jafar, Muhammad, 2020). Toleransi menjadi sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerja sama antarkelompok masyarakat yang berbeda dalam etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama berdasarkan prinsip saling menghormati. Dengan demikian maka toleransi bukan saja mengakui eksistensi dan hak orang lain, lebih dari itu terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan (Imam, 2021).

Penjelasan singkat di atas memberi konsekuensi lanjutan yakni terdapat dua jenis toleransi yakni toleransi positif dan toleransi negatif (Ruslan, 2020). Toleransi negatif hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti individu dan kelompok lain. Sedangkan toleransi positif membutuhkan tidak sekedar “membiarkan” orang lain, lebih dari itu juga membutuhkan bantuan dan kerjasama individu atau kelompok lain.

Toleransi penting dalam masyarakat demokratis yang pluralistik karena *pertama*, toleransi dapat membantu menjaga masyarakat bersama-sama, bahkan dalam menghadapi konflik yang intens. Jika ada ketaatan umum aturan kesetaraan dan toleransi maka konflik dapat diatasi dengan damai. *Kedua*, toleransi merupakan bagian dari hak-hak sipil di mana individu-individu dapat harapan di alam demokrasi. Individu seyogyanya dapat hidup tanpa rasa takut mengalami kekerasan mental dan fisik. *Ketiga*, intoleransi melanggar kebebasan individu atau warga negara karena kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang saling terkait (Djafar, 2018).

Maskuri mengemukakan bahwa toleransi memiliki unsur-unsur intrinsik yang perlu dihidupkan agar sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap toleransi yakni memberikan

kebebasan dan kemerdekaan kepada orang lain, mengaku hak setiap orang, menghormati hak orang lain dan saling mengerti (Jafar, Muhammad, 2020).

Unsur-unsur intrinsik toleransi pada akhirnya akan dimunculkan dalam sikap dan perilaku yang kelihatan ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda. Bentuk nyata dari toleransi dapat dilihat dalam sikap dan perilaku berikut:

- (a) Menghargai dan menghormati hak orang lain
- (b) Tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras dan gender
- (c) Tidak mengganggu atau menyakiti kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok
- (d) Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan
- (e) Tidak memaksakan orang lain sehubungan dengan keyakinan
- (f) Memberi kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan
- (g) Tetap bergaul dengan orang yang berbeda
- (h) Menghormati orang lain yang sedang beribadah
- (i) Tidak membenci atau menyakiti perasaan orang yang berbeda pendapat dan keyakinan (Jafar, Muhammad, 2020).

Dalam hidup bersama masyarakat plural terutama dalam isu sensitive yakni agama, tidak semua orang dapat memahami dan menjalankan sikap toleransi. Digoyo mengemukakan bahwa intoleransi dan konflik umat beragama terjadi disebabkan oleh (1) terbatasnya pengetahuan pemeluk agama akan agama sendiri dan agama orang lain. (2) Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. (3) Sikap tanggung jawab dari setiap pemeluk agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah masing-masing. (4) Keterbatasan pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah agama. (5) Fanatisme para pemeluk agama yang tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan menghargai agama lain. (6) Adanya kecurigaan antarumat beragama, baik internal maupun eksternal serta antarumat beragama dengan pemerintah. (7) Masalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Bila terjadi ketimpangan sosial ekonomi maka kedua faktor itu akan memicu sikap intoleran (Jafar, Muhammad, 2020).

Tidak hanya dalam kehidupan beragama yang beragama, dalam kehidupan sosial politik pun sering muncul intoleransi masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Terdapat tujuh faktor yang menyebabkan intoleransi dalam konteks sosial politik yang muncul dan atau digunakan. (a) Ketika seseorang atau sekelompok orang merasa kepentingannya terancam atau merasa kehilangan manfaat, kekuasaan dan hak-hak eksklusifnya. (b) buah dari fanatisme dan dogmatisme yakni “pandangan dan keyakinan saya benar dan selalu benar”. Sikap inilah yang melahirkan pelabelan negative kepada orang atau kelompok lain. (c) bentuk dari praktik “politik perut”. Untuk mendapatkan tujuannya, orang menghalalkan segala cara termasuk tidak toleran dengan orang lain. (d) saat jalan dialog dan keterlibatan konstruktif dibatasi atau dimatikan. Pluralisme hanya dapat terjadi jika wawasan dan lingkungan terbuka dan bebas terhadap yang berbeda. (e) hasil pengabaian warga dan aktor politik tentang aturan demokrasi. (f) Aturan tidak ada atau tidak jelas, tidak ditegakan atau ditegakan dengan tidak adil. (g) hasil dari sikap aktor politik dan individu yang telah kehilangan daya Tarik nasional dan popularitas karena itu terpaksa menggunakan isi suku, agama, etnis untuk kelangsungan hidup politiknya (Djafar, 2018).

Referensi

- Arif, M. (2021). *Model Kerukunan Umat Beragama*. Para Citra Madina.
- Butler, E. (2019). *Liberalisme Klasik* (M. Iksan (ed.)). FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION INDONESIA.
- Djafar, M. A. (2018). *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan atas Nama Agama*. Elex Media Komputindo.
- Imam, M. (2021). *Pendidikan Karakter Toleransi*. Nusa Media.
- Jafar, Muhammad, et al. (2020). *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal* (T. Lestari (ed.)). Jakad Media Publishing.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antarbudaya*. Kencana Prenada Media Group.
- Minogue, R. K. (2008). Liberalism. In *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern* (Kedua, pp. 456–459). Kencana Prenada Media Group.
- Nando, K. R. (2020). *Liberalisme: Pengantar Filsafat*. <https://feelsafat.com/>. <https://feelsafat.com/2022/05/liberalisme.html>
- PGSD/MI, T. D. (2020). *Memperkuat Identitas Bangsa melalui Pendidikan Multikultural: Konsep - Prinsip - Implementasi*. Guepedia.

- Roland, W. W. (2000). Liberalism. In *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (2nd ed., pp. 268–271). Raja Grafindo Persada.
- Rusian, I. (2020). *Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Suharno. (2021). *Pendidikan Multikulturalisme, Konsep, Tata Kelola dan Praktek Penyelesaian Konflik Multikultural* (D. Prasetyo (ed.)). Insania.
- Suyudi, B. S. (2003). *Politik Komunikasi* (Pertama). Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2005). Pendidikan dalam Multikulturalisme. In *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*. Depertemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.